

**PERANAN STAF AHLI GUBERNUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**O
L
E
H**

**PONIRAN
NIM: 098510063**



**ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Abstrak

Keberadaan staf ahli pemerintah daerah diperlukan diantaranya agar dapat mencegah meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, dengan adanya staff ahli dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dan membuat pemerintah daerah harus makin transparan, responsif dan partisipatif di dalam membuat kebijakan

Oleh karena salah satu peran dan fungsi penting staf ahli adalah policy advis bagi pimpinan daerah, maka kemampuan, ketrampilan dan kompetensi seorang staf ahli untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis daerah karena staf ahli juga merupakan analisis kebijakan public..

Jadi sebagai analis kebijakan, staff ahli adalah semacam lembaga atau media yang mempunyai tugas pokok mengkaji, mendalami, menimbang dan memberikan sumbang saran terhadap sebuah rumusan kebijakan publik.

Peranan staf Ahli dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam proses penyelenggaraan dan meningkatkan tugas-tugas pemerintahan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian yang mengambil lokasi di Sumatera Utara ini dengan mengandalkan populasi dan sample penelitian staf ahli kantor gubernur dan pegawai pada kantor gubernur ini juga guna memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana S1 dilakukan sesuai dengan sistematika penelitian

Penelitian ini dibatasi pada peranan staf ahli dalam melakukan tugas-tugasnya dalam meningkatkan proses penyelenggaraan yang dirumuskan dengan peranan staf ahli dapat meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintah Disamping itu juga dapat dipahami tugas-tugas staf ahli dan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci. Peranan dan pemerintahan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Pembatasan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kepemimpinan.....	9
B. Teori Kepemimpinan.....	10
C. Pengertian Gubernur.....	11
D. Pengertian Organisasi.....	12
E. Pengertian Staff Ahli.....	13
F. Hipotesis	16

17

i



BAB III . METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Jenis penelitian	18
B. Populasi dan Sampel	18
1. Populasi.....	19
2. Sampel.....	20
C. Metode Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Sumber data penelitian.....	20
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A. Aspek Geografi	26
B. Aspek Demografi.....	27
C. Penduduk.....	28
D. Sosial kemasyarakatan.....	31
E. Wilayah Pemerintahan Administrative.....	32
F. Peranan Lembaga Staff Ahli	34
BAB V . ANALISIS DAN EVALUASI.....	35
A. Keberadaan Staff Ahli Gubernur.....	36
B. Peranan Staf Ahli dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	38
C. Pentingnya Staf ahli dalam menganalisis Kebijakan public.....	40
D. Staf ahli berperan dalam Kebijakan Publik.....	42
E. Perlunya Kebijakan Pemerintah Daerah dianalisis Oleh Staf Ahli.....	44
	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 (Revisi dari UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat. Sehingga peran pemerintah sebagai peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat semakin terasa. .

Sumber daya yang ada mutlak harus dioptimalkan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa tercapai.

Untuk menciptakan pelayanan yang bermutu seluruh pihak yang terkait dengan masyarakat aparat pemerintah dan administrasi daerah, pada semua tingkatan

Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mampu mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dengan kesadaran penuh untuk mencapai tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram. Seperti yang diungkapkan Nawawi (1992: 122) “Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu”

Peran Pemerintah dan efektivitas pencapaian tujuan, dilakukan dengan melaksanakan upaya-upaya memberikan serta menggerakkan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Bahkan merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan manusiawi, sehingga ketertiban dan keamanan dapat terlaksana. Namun, kecenderungan yang terjadi selama ini bahwa pola kebijakan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan program pembangunan

Maka untuk melaksanakan pembangunan dimaksud sangat diperlukan creator Dalam menjalankan kebijakan pembangunan sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah, didalam peraturan tersebut disebutkan diperlukannya kehadiran staff ahli dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah Staf ahli, pada level lembaga atau organisasi macam apapun memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan penyediaan informasi dan analisis yang perlu dilakukan guna pembuatan keputusan tertentu.

Pada perspektif kebijakan publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi (policy adviser) yang biasanya dalam bentuk policy paper, kepada top manager atau pada tataran pemerintah daerah peran staf ahli adalah sebagai policy adviser bagi Kepala Daerah.

Paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa keberadaan staf ahli pemerintah daerah diperlukan :

- (1) Meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah;



- (2) Adopsi nilai-nilai demokrasi yang membuat pemerintah daerah harus makin transparan, responsif dan partisipatif di dalam membuat kebijakan;
- (3) Makin terbatasnya berbagai sumberdaya yang menuntut penggunaan sumberdaya tersebut secara bijak dengan perumusan kebijakan yang akurat.

Oleh karena salah satu peran dan fungsi penting staf ahli adalah policy advis bagi pimpinan daerah, maka kemampuan, ketrampilan dan kompetensi seorang staf ahli untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis daerah serta mempunyai kompetensi kebijakan tingkat daerah, menjadi sangat sangat penting untuk dikuasai bagi seorang staf ahli.

Dengan demikian penguatan kapasitas staf ahli ini diharapkan akan memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi staf ahli pemerintah daerah dalam konteks analisis kebijakan daerah, dan sekaligus menepis opini negatif kelembagaan staf ahli yang dianggap sebagai pelengkap penderita yang tidak jelas job deskripsinya, dan bahkan ada pula yang mengatakan sebagai korban politik, adalah pendapat yang sangat tidak tepat dan keliru.

Staf Ahli juga merupakan sebagai analisis kebijakan public. Walaupun tidak secara langsung mengkalim bahwa analis kebijakan adalah orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa analis kebijakan publik adalah pihak yang melakukan kajian, pembahasan dan pertimbangan secara detail terhadap sebuah persoalan atau rumusan hasil kajian yang akan dijadikan sebagai sebuah kebijakan publik. Jadi analis kebijakan adalah semacam lembaga atau media yang mempunyai tugas pokok mengkaji,

mendalami, menimbang dan memberikan sumbang saran terhadap sebuah rumusan kebijakan publik.

Tugas Kepala Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 25 : bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
- b. Mengajukan rancangan Perda,
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD,
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah (lihat pasal 22),
- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena staf ahli merupakan Tim Kreator Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf ahli Kepala daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pemandagri 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai bahagian internal dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah, keberadaan Staf ahli juga sangat menentukan dalam menyusun berbagai pertimbangan dan saran kepala daerah, oleh karena itu setiap SKPD harus terbuka dalam memberikan informasinya. Disamping itu, staf Ahli sebagai personil yang selalu memotivasi dirinya dan senantiasa menambah wawasan, baik melalui literatur, internet, sosialisasi, maupun bintek dan diklat, sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang optimal. Sehingga berbagai pertimbangan dan saran yang dihasilkan oleh staf Ahli benar-benar memiliki bobot yang tinggi. Staf Ahli harus Ahli dibidangnya.

Secara nasional kepala daerah telah membentuk lembaga Staf Ahli Kepala Daerah, walaupun dirasakan keberadaannya masih variatif dimasing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu memperhatikan kondisi kekinian yang dihadapi oleh hampir seluruh staf ahli kepala daerah, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan terhadap penguatan peran dan fungsi staf ahli, pertama perlu dilakukan penjabaran uraian tugas, fungsi dan kewenangan. Kedua dukungan alokasi anggaran, Ketiga dukungan tenaga staf yang khusus membantu seorang staf ahli, Keempat fasilitas, sarana dan prasarana yang representatif sesuai dengan eselonering dan kemampuan daerah masing-masing dan ke lima kedudukan protokoler staf ahli. Kita menunggu kecermerlangan tugas-tugas yang diemban oleh staf ahli kepala daerah akan berbanding lurus dengan fasilitas dan dukungan staf ahli dalam memposisikan dirinya sebagai Tim Kreator Pemerintah Daerah.

Mengingat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti peran peran staf ahli dalam pemerintahan daerah dengan mengambil judul “Peranan Staf Ahli Gubenur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara”

B. Identifikasi Permasalahan

Mengingat Peran starf Ahli dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah bagaimana peranan staf ahli dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya tugas tugas staf Ahli duiperlukan pembatasan masalah yang diteliti agar penelitian dimaksud terarah, untuk itu pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagaimana dalam latar belakang dibatasi bagaimana peranan staf ahli dalam melakukan tugas-tugasnya dalam meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan peranan staf ahli dapat meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintah di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

E. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui Peranan Staf Ahli di kantor Gubernur Sumatera Utara
- Untuk mengetahui apakah peranan staf ahli dapat meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara
- Untuk memberikan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara

F. Manfaat Penelitian

Ada lima manfaat yang dapat diuraikan dari penelitian ini, antara lain:

- Hasil penelitian dapat memahami peranan staf ahli dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
- Untuk mengetahui peranan staf ahli dalam meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara
- Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana meningkatkan peranan staf ahli di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan inti dari sebuah organisasi, Kartini Kartono (1990: 33) “ Kepemimpinan berasal dari perkataan Pemimpin/ *Leader* yang mempunyai pengertian sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi dengan kata lain pemimpin adalah seorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan tertentu.

Sementara Kartini Kartono (1990: 39) lebih lanjut mengatakan Kepemimpinan itu sendiri secara definisi adalah merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedang menurut Stoner dalam bukunya Bukhori (2005:73) kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.

Selain itu Bejo Sisiwanto (2006: 310) kepemimpinan juga dapat diartikan dengan sikap dan perilaku untuk mempengaruhi orang lain (karyawan) agar mereka mampu bekerjasama, sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dan

efisien untuk mencapai angka produktifitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di lain pihak Gibson dkk (1990: 33), mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan. mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan, faktor manusialah yang menggabungkan kelompok menjadi satu dan memberi motivasi kelompok itu menuju sasaran.

Sehingga dari beberapa definisi tentang kepemimpinan tersebut diatas dapat ditarik pengertian sebagai berikut:

- 1). Bahwa kepemimpinan meliputi kemampuan untuk mempengaruhi bawahan atau pengikutnya.
- 2). Kepemimpinan menitik beratkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3). Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan atau pengikutnya.

Dengan mengetahui dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapatlah kiranya diartikan bahwa: Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk beraktivitas, memimpin, menggerakkan atau mempengaruhi bawahan dan melakukan koordinasi serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai seorang pemimpin sangatlah tidak mudah karena ia harus bisa memfungsikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu menjalankan pekerjaannya serta bertanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut dengan baik, Robert C. Miljus dalam bukunya Human Relation On the Shop Flor

sebagaimana yang dikutip Heijdrahman (2002: 318) mengemukakan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan dan lain sebagainya).
- b. Melengkapi para karyawan dengan sumberdana-sumberdana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diharapkan dari mereka.
- d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
- e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
- g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
- h. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

B. Teori Kepemimpinan

Pada umumnya teori kepemimpinan sebagaimana disebut Nawawi (1990: 39) berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, salah satunya adalah teori perilaku (behavior theory). Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian teori ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinannya. Gaya atau perilaku

kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mengendalikan dan mengawasipekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat dan cara pemberian sanksi/hukuman.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan merupakan strategi kepemimpinan yang memiliki dua orientasi yang terdiri dari:

1. Orientasi pada tugas.
2. Orientasi pada tugas atau barang.

Blake dalam Mawarni menyimpulkan bahwa himpunan yang efektif atau yang mampu mengefektifkan dapat diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pemerintah.

C. Pengertian Gubernur

Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Kata "gubernur" bisa berasal dari bahasa Portugis "*governador*", bahasa Spanyol "*gobernador*", atau bahasa Belanda "*gouverneur*". Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh

Menteri dalam negeri (Mendagri) atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.

Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

D. Pengertian Organisasi

Pengertian organisasi dalam penyelenggaraan proses pemerintahan secara formal dapat dilihat dari aspek fungsinya begitu juga struktur keorganisasiannya secara formal

Organisasi-organisasi yang distrukturi berdasarkan fungsinya menyatu dalam sebuah departemen dimana semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tertentu atau berbagai macam aktivitas yang berkaitan satu sama lain. dan hal ini seringkali mempunyai staff- staff ahli yang menguasai bidang- bidangnya secara professional

Pengertian organisasi dan struktur keorganisasian juga seringkali. Kita gunakan kedua istilah tersebut berulang kali. Dalam arti yang paling luas pengorganisasian dapat kita nyatakan sebagai proses dimana diupayakan agar struktur suatu organisasi tertentu cocok dengan sasaran-sasarannya, sumber dayanya dan lingkungannya. Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai pengaturan dan antar hubungan bagian-bagian komponen dan posisi-posisi sesuatu perusahaan (Stoner et.al 1989-246)

Dan selanjutnya dapat dikatakan bahwa struktur suatu organisasi mensifikasi aktivitas-aktivitas kerjanya dan ditunjukkan olehnya bagaimana berbagai fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda saling berhubungan satu sama lain hingga tingkat tertentu .

Struktur keorganisasian memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi yang bersangkutan menghadapi keluar masuknya individu-individu dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas dengan lingkungannya.

E. Pengertian Staf Ahli

Sebutan sebagai staf ahli kepala daerah sebenarnya cukup mentereng, namun ternyata masih banyak yang enggan menyandanginya bahkan malah dianggap sebagai jabatan yang harus dihindari. Di banyak daerah menempati posisi ini malah dianggap sebagai akhir dari segalanya.

Ada anggapan yang berkembang, bahwa jadi staf ahli berarti masuk kotak. Namun ada juga yang menganggap jadi staf ahli artinya sedang diparkir sementara, sambil menunggu jabatan SKPD yang lowong. Setelah ada jabatan

yang lowong, maka pejabat yang bersangkutan dikembalikan ke SKPD kembali.

Sebenarnya anggapan tersebut tidak benar, karena staf ahli memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan daerah seorang walikota/bupati, Merujuk pada PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Pasal 36 ayat (3) PP Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.

Mereka dikoordinir oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Secara struktural, staf ahli gubernur masuk eselon II a, sedangkan staf ahli bupati/walikota masuk eselon II b. Tugas dan fungsi staf ahli sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. Syaratnya, tugas dan fungsi mereka harus di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada. Staf ahli berperan mengurai jalur birokrasi yang berbelit-belit jika seorang kepala daerah ingin menjalankan program. Jika semata-mata mengandalkan birokrat, bisa saja program kepala daerah tidak terlaksana dengan baik.

Kehadiran staf ahli membuat terang sesuatu bagi kepala daerah. Secara teoritis, staf ahli adalah jabatan yang sangat strategis, karena merupakan "otak" atau "konsultan" Kepala Daerah dibidang tertentu atau bisa disebut juga tim kreator di pemerintah daerah. Tetapi praktiknya sesungguhnya sangat tergantung kepada kepala daerah dan staf ahli tersebut. Kalau kepala daerah tidak memilih berdasarkan keyakinan ia mampu dan mempunyai keahlian dibidangnya, tentu kepala daerah tersebut sudah apriori terlebih dahulu, sehingga tidak akan memperhatikan masukan dari yang bersangkutan. Seharusnya memang hal yang

demikian tidak perlu terjadi kalau kepala daerah objektif dalam memilih orang yang diangkat.

Dalam huruf G Staf Ahli, sebagaimana Peraturan menteri nomor 57 diatas staf ahli terbagi:

1. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
3. Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Tugas Staf ahli :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif juga beratkan pada pemahaman terhadap objek yang diteliti yaitu Proses Penyelenggaraan Pemerintahan ditinjau dari ,peranan staf ahli di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan “field research” dan farm of reference”

B. Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat penelitian pada kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Biro Asset Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah staf ahli 1 orang dan 30 pegawai staff ahli ,

Pelaksanaan dan waktu penelitian ini direncanakan akan berlangsung lebih kurang tiga bulan terhitung sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2013.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiono (2002: 108) “Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian.. Selain itu Sugiono juga mendefinisikan, populasi adalah wilayah yang terdiri atas; objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi Sugiono (2006: 55) bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah staf ahli di Biro Asset Provinsi Sumatera Utara dan 30 pegawai pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

b. Sampel

Sampel menurut Sugiono (2006: 55) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili jumlah populasi dalam penelitian

Untuk menentukan jumlah besaran sampel dalam penelitian Arikunto memberi pendapat untuk sekedar batasan, apabila subjek dalam penelitian kurang dari 100 dikategorikan sampel kecil yang dalam penelitian jumlah populasi tersebut otomatis juga menjadi sampel secara langsung, namun jika subjeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-15%, sebab jumlah tersebut dapat

dianggap mewakili jumlah populasi yang ada atau tergantung setidaknya-tidaknya dari:

- a). Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana,
- b). Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data,
- c). Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Pada penelitian ini, yang menjadi sampel adalah

- a. Satu Staf ahli kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
- b. Para pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang

D. Teknik pengumpulan data

Observasi secara intensif untuk mengetahui kondisi objektif tentang peranan staf ahli pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Melakukan Wawancara yakni Tanya jawab terstruktur dengan para Informan atau pihak yang terkait dengan masalah penelitian dalam rangka menggali data yang diteliti secara akurat.

Melakukan pencatat semua data penelitian yang berkaitan dengan peranan staf ahli dalam meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

E. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai key person berupaya yaitu :

- a. Data primer: Pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Data sekunder: Literature-literatur yang relevan dengan penelitian, berupa Undang-Undang dan peraturan –peraturan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

F. Tehnik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan diskripsi kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode diskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

- a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat membuang hal-hal yang tidak penting.

- b. Penyajian Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita yang sistematis yang harus disajikan. Melalui sajian data akan memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan.

- c. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data. Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat mengamati catatan lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali melakukan pengumpulan data (Miles, 1992 : 20).



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Aspek Geografi

Provinsi Sumatera Utara mempunyai wilayah yang sangat luas, dan memiliki kekayaan, kultur dan keadaan alamnya yang sangat berlimpah begitu juga dengan penduduknya yang heterogen.

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km^2 . dan terbagi atas: Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat, Kepulauan Nias.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Keadaan alam Provinsi Sumatera Utara di sekitar wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan-pegunungan yang berbaris atau saling bertautan hampit tidak terputus yang berlainan satu sama lain sehingga

disebut Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Seperti daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau Toba.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

1. Batas wilayah

Sumatera Utara mempunyai batas-batas

- a. Sebelah Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur Selat Malaka

Mengingat Provinsi Sumatera Utara juga dibatasi oleh Samudra Indonesia dan selat malak, tidak heran kalau provinsi Sumatera Utara juga memiliki banyak pulau-pulau dan terdapat sekitar 419 pulau. Dan memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetang seperti Malaysia, Singapura dan Philipina seperti pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

disebut Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Seperti daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau Toba.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

1. Batas wilayah

Sumatera Utara mempunyai batas-batas

- a. Sebelah Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur Selat Malaka

Mengingat Provinsi Sumatera Utara juga dibatasi oleh Samudra Indonesia dan selat malak, tidak heran kalau provinsi Sumatera Utara juga memiliki banyak pulau-pulau dan terdapat sekitar 419 pulau. Dan memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetang seperti Malaysia, Singapura dan Philipina seperti pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

Menurut angka yang bersumber dari data ASumatera Utara dalam angka tahun 2011 Sumatera Utara memiliki Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Sehingga hingga kini diperkirakan, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

B. Aspek Demografi

1. Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa dan data terakhir diperkirakan pada tahun 2013 ini berjumlah 17.46 juttaa jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km².

C. Sosial kemasyarakatan

1. Suku bangsa

Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat.

Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Pusat penyebaran suku-suku di Sumatera Utara, sebagai berikut :

- Suku Melayu : Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat
- Suku Batak Karo : Kabupaten Karo
- Suku Batak Toba : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir
- Suku Batak Mandailing : Kabupaten Mandailing Natal
- Suku Batak Angkola : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas



- Suku Batak Simalungun : Kabupaten Simalungun
- Suku Batak Pakpak : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat
- Suku Nias : Pulau Nias
- Suku Minangkabau : Kota Medan, Kabupaten Batubara, Pesisir barat
- Suku Aceh : Kota Medan
- Suku Jawa : Pesisir timur
- Suku Tionghoa : Perkotaan pesisir timur & barat.

2. Bahasa

Pada dasarnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah Bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan Bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir timur seperti wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodek, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai Bahasa Melayu dialek "o" begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam. Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek "e" yang sering juga disebut bahasa Mayamaya. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan Bahasa Jawa sebagai pengantar sehari-hari.

Di kawasan perkotaan, orang Tionghoa lazim menuturkan Bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang terbagi atas empat logat (Silindung-Samosir-Humbang-Toba). Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. Sedangkan orang-

orang di pesisir barat, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal menggunakan Bahasa Minangkabau.^[10]

3. Agama

Dari sisi keagamaan Sumatera Utara mempunyai agama yang dianut masyarakat Sumatera Utara yaitu:

- a. Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, suku Batak Mandailing, sebagian Batak Karo, Simalungun dan Pakpak
- b. Kristen (Protestan dan Katolik): terutama dipeluk oleh suku Batak Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Nias
- c. Hindu: terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan
- d. Buddha: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
- e. Konghucu : terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
- f. Parmalim: dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi
- g. Animisme: masih ada dipeluk oleh suku Batak, yaitu Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya

4. Pendidikan

Pada tahun 2005 jumlah anak yang putus sekolah di Sumut mencapai 1.238.437 orang, sementara jumlah siswa miskin mencapai 8.452.054 orang.

Dari total APBD 2006 yang berjumlah Rp 2.204.084.729.000, untuk pendidikan sebesar Rp 139.744.257.000, termasuk dalam pos ini anggaran untuk bidang kebudayaan.

Jumlah total kelulusan siswa yang ikut Ujian Nasional pada tahun 2005 mencapai 87,65 persen atau 335.342 siswa dari 382.587 siswa tingkat SMP/SMA/SMK sederajat peserta UN . Sedangkan 12,35 persen siswa yang tidak lulus itu berjumlah 47.245 siswa.

5. Tenaga kerja

- a. **Angkatan Kerja.** Pada tahun 2002 angkatan kerja di Sumut mencapai 5.276.102 orang. Jumlah itu naik 4,72% dari tahun sebelumnya. Kondisi angkatan kerja itu juga diikuti dengan naiknya orang yang mencari pekerjaan. Jumlah pencari kerja pada 2002 mencapai 355.467 orang. Mengalami kenaikan 57,82% dari tahun sebelumnya.
- b. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).** Jumlah TPT di Sumut naik dari 4,47% pada 2001 menjadi 6,74% pada 2002. TPT tertinggi terjadi di Kota Medan mencapai 13,28%, diikuti Kota Sibolga (11,71%), Kabupaten Langkat (11,06%), dan Kodya Tebing Tinggi (10,91%).
- c. **Angkatan Kerja.** Penduduk yang tergolong angkatan kerja berjumlah 5,1 juta jiwa. Sekitar 34% berstatus sebagai majikan, bekerja sendiri (20%), dan pekerja keluarga (23%). Skala usaha tergambar pada komposisi yang

didominasi oleh usaha kecil sekitar 99,8% dan hanya sekitar 0,2% yang tergolong usaha besar.

- d. **Pendidikan Pekerja.** Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja. Pekerja yang berpendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD) atau sampai tamat SD mencapai 48,96%. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 23%. Sedangkan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 24,08%. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi hanya 3,95%.

D. Wilayah Administratif Pemerintahan

Provinsi Sumatera Utara secara administratif pemerintahan memiliki wilayah wilayah pemerintahan kabupaten dan kota, dan memiliki pusat-pusat penyelenggaraan pemerintahan di ibukota masing-masing kabupaten dan kota, hingga saat ini provinsi Sumatera Utara, mempunyai kabupaten/kota yaitu

No. Kabupaten/Kota	Ibu kota
1 Kabupaten Asahan	Kisaran
2 Kabupaten Batubara	Limapuluh
3 Kabupaten Dairi	Sidikalang
4 Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
5 Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
6 Kabupaten Karo	Kabanjahe
7 Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat

8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
10	Kabupaten Langkat	Stabat
11	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
12	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
13	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
14	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
15	Kabupaten Nias Utara	Lotu
16	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
19	Kabupaten Samosir	Pangururan
20	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
21	Kabupaten Simalungun	Raya
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
25	Kabupaten Toba Samosir	Balige
26	Kota Binjai	Binjai Kota
27	Kota Gunungsitoli	Gunung Sitoli

8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
10	Kabupaten Langkat	Stabat
11	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
12	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
13	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
14	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
15	Kabupaten Nias Utara	Lotu
16	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
19	Kabupaten Samosir	Pangururan
20	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
21	Kabupaten Simalungun	Raya
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
25	Kabupaten Toba Samosir	Balige
26	Kota Binjai	Binjai Kota
27	Kota Gunungsitoli	Gunung Sitoli

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Staf ahli, pada level lembaga atau organisasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah
2. Staf ahli juga dapat menjadi penyedia informasi dan menganalisis isu-isu guna pembuatan keputusan tertentu
3. Jabatan staf ahli memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tak bisa dipandang sebelah mata. Posisinya hampir sejajar sebagai penasehat gubernur. yang setiap saat dimintai pandangan-pandangannya sesuai dengan keahliannya.
4. Peran staf ahli adalah sebagai policy adviser bagi Kepala Daerah.

B. S a r a n .

1. Untuk itu keberadaan staf ahli dapat dikatakan harus optimal dalam membantu tugas gubernur, baik dalam bentuk menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaah yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur.
2. Berdasar luas dan besarnya tugas dan tanggungjawab gubernur Sumatera Utara diperlukan adanya staf ahli yang benar-benar punya keahlian dibidang masing-masing.

3. Dalam perspektif kebijakan publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan maka staf ahli harus dapat berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi (policy adviser)
4. Penguatan kapasitas staf ahli ini diharapkan memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi staf ahli pemerintah daerah



DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia PT. Gramedia Jakarta,
- Bukhori, Muhammad. 2005. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Gramedia
- Dimock and Dimock*, 1984., Administrasi Negara, Aksara. Baru, Jakarta,
- Gibson, dkk. 1997. Manajemen. Jakarta: Erlangga
- Hadari, Nawawi. 1992. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: UGM Press
- J. Winardi, 2003, Teori Organisasi, Jakarta Grapindo Persada
- Kartono, Kartini. 1990. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Martadisastra, Ukasah, 1981., Perbandingan Administrasi Penerbit, Nova, Bandung ,
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofyan. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Peraturan menteri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Pemerintah Daerah
- Poerwadarminta, WJS. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Siagian, SP, 1984 , Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta,
- Sugiyono. 2006. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sukarna, Administrasi Negara Perbandingan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Suryabarata, Ermaya. 1997. Kamus Ilmiah Populer. Jakarta: Bina Aksara
- Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah